

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017-2021**

Skripsi

OLEH

**GUSTI ALBAR ZANJI
B1033151056**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
2023**

PERYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Gusti Albar Zanj
Nim : B1033151056
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Angkatan/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-
2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan terlampir). Apabila didalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang dapat berakibat pada pembatalan skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Maret 2023

(Gusti Albar Zanj)
(NIM B1033151056)

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gusti Albar ZANJI
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Seminar Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian :

Judul Skripsi:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil
Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2017-2021

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber
baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Maret 2023

Yang membuat pernyataan

(Gusti Albar ZANJI)

(NIM B1033151056)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

Ini diajukan oleh:

Nama : Gusti Albar Zanj

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Tanggal Ujian :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister Manajemen.

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I			
Pembimbing II			
Penguji I			
Penguji II			

MAJELIS PENGUJI

Pontianak, Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Khristina Yunita, S.E., M.Si
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketabahan, kesehatan, semangat, dan kekuatan serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021”.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik bantuan materi maupun non materi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Khristina Yunita, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tanjungpura
3. Sari Rusmita, S.E., M.M selaku Ketua PPAPK Program Studi Akuntansi Universitas Tanjungpura
4. Virtiyan Espa, S.E., M.S.A., K., C.Ht., CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Tanjungpura.
5. Gita Gesyana, S.E., MM., AK., CIQaR selaku Pembimbing yang selalu memberikan inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ira Grania Mustika, SE., MM., AK selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini.
7. Angga P. Karprina, SE., M.Acc., AK., CIQaR selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Program Studi Studi Akuntansi Manajemen Universitas Tanjungpura.
9. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungannya yang tiada henti.

10. Teman-teman seperjuangan S-1 Program Studi Studi Akuntansi yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal kebajikannya diterima Allah SWT, amin. Akhirnya semoga apa yang diberikan kepada penulis tersebut akan mendapat balasan yang setimpal dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Maret 2023

Penulis,

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2021**

**Oleh
Gusti Albar Zanjji**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017-2021. Jenis penelitian kuantitatif. Model yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi linier berganda dan uji statistik. Hasil penelitian mengungkapkan: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021, 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021, dan 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.

Kata Kunci : PAD, DAU, DBH, Belanja Modal.

**THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND AND
PROFIT SHARING FUND ON CAPITAL EXPENDITURE IN
REGENCIES/CITIES OF WEST KALIMANTAN PROVINCE IN 2017-2021**

**By
Gusti Albar Zanj**

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of local revenue, general allocation funds and profit sharing funds on the level of regional financial independence in the Regency / City of West Kalimantan Province for the 2017-2021 period. Types of quantitative research. The models used in the study are multiple linear regression models and statistical tests. The results of the study revealed: 1) Regional Native Income has a negative and significant effect on the level of capital expenditure in the Regencies/Cities of West Kalimantan Province in 2017-2021, 2) the General Allocation Fund has a negative and insignificant effect on the level of capital expenditure in the Regencies/Cities of West Kalimantan Province in 2017-2021, and 3) the Profit Sharing Fund has a negative and significant effect on the level of capital expenditure in the Regencies/Cities of West Kalimantan Province in 2017-2021.

Keywords: PAD, DAU, DBH, Capital Expenditure.

RINGKASAN SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

1. Latar Belakang

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Seharusnya dalam era otonomi peran PAD semakin besar dalam membiayai belanja daerah.

Namun di dalam implementasinya masih saja ditemukan kendala, yaitu kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil).

Kurun waktu 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bahwa PAD di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif (naik turun). PAD tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.666.496.868. Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Kota Pontianak pada

tahun 2017 mencapai Rp. 476.050.410,31 pada sektor pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan semua sektor lain dan BPHTB.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada dana transfer dari Pemerintah Pusat di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan dan sumbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD (Tambunan, 2012).

DAU tertinggi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.149.675.156,000 dan terendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 2.206.389,00 di Kabupaten Sekadau. Apabila DAU yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar, maka daerah tersebut masih sangat bergantung pada transferan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya, yang berarti tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut masih rendah. DAU, DAK, dan DBH serta transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

DBH tertinggi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2017 mencapai Rp. 25.907.411.445,75 dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp. 944.681,000 di Kabupaten Melawi. belanja modal tertinggi di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 mencapai Rp. 696.363.343,014 dan terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp. 135.551.374,181 di Kabupaten Melawi.

Secara umum pemerintah daerah Kalimantan Barat masih banyak mengalami masalah diantaranya ketidakcukupan sumber daya financial, minimnya jumlah pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian, prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memenuhi, rendahnya produktivitas pegawai, infrastruktur yang kurang

mendukung, lemahnya penegak hukum (aparatur penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum, *political will* yang rendah, adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan lemahnya akuntabilitas sehingga hasil PAD, DAU, DBH dan belanja modal lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Jawa Tengah.

2. Permasalahan

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat belanja modal?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat belanja modal?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat belanja modal?

3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat belanja modal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat belanja modal.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat belanja modal.

4. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari metode survey melalui jaringan internet hasil download dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yaitu BPS Kalimantan Barat dan sumber lain yang terkait. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

5. Hasil dan pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diketahui melalui uji *Fixed Effect*, pada uji *Fixed Effect* tersebut, nilai F-probabilitasnya sebesar 0,0000 yaitu lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga H_0 diterima, artinya PAD mempengaruhi belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya PAD yang ada di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat akan berpengaruh pada menurunnya belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap kenaikan jumlah PAD akan diikuti oleh menurunnya jumlah belanja modal sebesar - 0,557893%. Hal ini disebabkan ada nilai PAD yang rentangnya sangat jauh antar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD berpengaruh negative signifikan terhadap belanja modal.

Juniawan dan Suryantini (2018), Raini, Suzan dan Mahardika (2017), dan Susanti, dan Fahlevi (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal

Pengaruh DAU terhadap Tingkat Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diketahui melalui uji *Fixed Effect*, pada uji *Fixed Effect* tersebut, nilai F-probabilitasnya

sebesar 0,7117 yaitu lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H_0 diterima, artinya DAU tidak mempengaruhi belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya DAU yang ada di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat akan menurunkan belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap kenaikan jumlah DAU akan diikuti oleh menurunnya jumlah belanja modal sebesar -0,008427%.

Hal ini disebabkan karena ada indikasi pemerintah daerah menggunakan DAU digunakan untuk belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya dari pada di alokasikan untuk Belanja Modal. DAU merupakan pos yang memperoleh dana transfer paling banyak dari pemerintah pusat, Namun dalam penggunaannya digunakan untuk menanggung belanja pegawai ataupun biaya lainnya. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Gerungan et al., 2017) yang menunjukka bahwa DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Selain itu penelitian yang dilakukan (Hairiyah et al., 2017) juga menyatakan bahwa setelah pemekaran DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DAU yang selama ini diterima oleh daerah diindikasikan tidak digunakan untuk Belanja Modal, hal ini dapat dilihat pada penelitian ini. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan peruntukan pembiayaan pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit untuk belanja modal

Pengaruh DBH terhadap Tingkat Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat diketahui melalui uji *Fixed Effect*, pada uji *Fixed Effect* tersebut, nilai F-probabilitasnya sebesar 0,0751 yaitu lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H_0 diterima, artinya DBH tidak mempengaruhi belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya DBH yang

ada di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat akan menurunkan belanja modal di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap kenaikan jumlah DBH akan diikuti oleh menurunnya jumlah belanja modal sebesar 0,052087%.

Hal ini tidak sesuai dengan hukum Wagner memang dikatakan bahwa ketika penerimaan pemerintah meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 2016).

Hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory* pemerintah pusat mentransfer dana APBN berupa DBH untuk diberikan kepada pemerintahan daerah agar dapat digunakan untuk belanja modal atau memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dengan demikian besaran DBH tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat besaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian (Mentayani, 2015) yang menyatakan bahwa DBH pajak dan DBH sumberdaya alam tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. DBH sendiri merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DBH yang diterima oleh Kabupaten/Kota Kalimantan Barat sangat sedikit, ini dikarenakan DBH sebagian besar berasal dari sektor perkebunan khususnya sawit. Penurunan penerimaan DBH ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak dan harga sawit yang belum stabil sehingga berdampak vital bagi dunia usaha terutama sektor perkebunan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Febriana (2015) dan Heliyanto (2016) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja modal.

6. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan penelitian ini: Hasil penelitian mengungkapkan: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021, 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021, dan 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap tingkat belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021.

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut: Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN	iii
PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK/ ABSTRACT	vi
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kontribusi Penelitian	10
BAB 2 KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1. Kajian Teori	11
2.1.1. Otonomi Daerah.....	11
2.1.2. Keuangan Daerah.....	13
2.1.3. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)	17
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.5. Dana Alokasi Umum	20
2.1.6. Dana Bagi Hasil	22
2.1.7. Belanja Modal.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Pemikiran	27

BAB 3	METODE PENELITIAN.....	32
	3.1. Jenis Penelitian	32
	3.2. Obyek Penelitian.....	32
	3.3. Sumber Data dan Pengumpulan Data	32
	3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel....	33
	3.5. Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	4.1. Hasil Penelitian.....	38
	4.2. Pembahasan	42
BAB V	PENUTUP.....	46
	5.1. Simpulan	46
	5.2. Saran	46
	DAFTAR PUSTAKA	47
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Ribu).....	4
Tabel 1.2	Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Ribu).....	5
Tabel 1.3	Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Ribu).....	6
Tabel 1.4	Belanja Modal Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021 (Ribu).....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1	Penelusuran Model.....	38
Tabel 4.2	Hasil Regresi dengan <i>Pooled Least Squares Fixed Effect</i>	39
Tabel 4.3	Rangkuman Hasil Uji Signifikansi Koefisien dengan Uji t	40
Tabel 4.4	Rangkuman Hasil Uji Kebaikan Model Uji F	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Awal PAD, DAU, DBH Dan Belanja Modal
- Lampiran 2 Data LON PAD, DAU, DBH Dan Belanja Modal
- Lampiran 3 Hasil Uji Model Commen Effect, Comment Effect Weights Fixed Effect, Fixed Effect Weights, Random Swamy Arora, Wallace-Hussain Dan Random Wansbeek-Kapteyn

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Ketentuan Umum UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, otonomi daerah menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya bagi pemerintah daerah dalam mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Hal ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Manan dalam Andi (2016) mendefinisikan otonomi sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi. Kurang lebih sudah 16 tahun sistem otonomi daerah diberlakukan di Indonesia sehingga sudah dapat dilihat sejauh mana tingkat kemandirian masing-masing daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi atau sumber daya manusia, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja yang berasal dari anggaran daerah.

Halim (2014:3) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Anggaran daerah yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan rencana keuangan yang disusun untuk diimplementasikan melalui kinerja pemerintah yang dituangkan di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Didalam struktur APBD, belanja modal berada dalam urutan ketiga setelah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (Permendagri 13 Tahun 2006). Belanja modal adalah belanja yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya (Darise, 2009:39).

Menurut Mulyanto (2007:71), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Pemerintah daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Akan tetapi, faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi anggaran aparatur masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk rakyat misalnya anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil daripada belanja pegawai.

Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

Aktivitas pembangunan dalam pemerintahan selalu berhubungan erat dalam kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah, dimana pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (2016:16) menegaskan beberapa ukuran antara lain kemampuan struktural organisasi, kemampuan aparatur pemerintah daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya didalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Hal yang paling mempengaruhi yaitu pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah. Melalui

kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Seharusnya dalam era otonomi peran PAD semakin besar dalam membiayai belanja daerah.

Namun di dalam implementasinya masih saja ditemukan kendala, yaitu kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil).

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021
(Ribu)

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Sambas	1.634.003.340	1.699.544.378	1.834.749.640	1.669.647.857	4.890,60
2	Kab. Bengkayang	1.078.309.134	1.003.842.348	1.114.019.313	906.877.447	37.920,10
3	Kab. Landak	1.287.252.892	1.331.244.857	1.377.117.042	1.385.669.881	15.139,70
4	Kab. Pontianak	994.812.355	1.032.566.728	1.032.566.728	976.603.859	8.529,80
5	Kab. Sanggau	1.524.432.728	1.570.852.680	1.652.648.339	1.523.255.586	14.702,80
6	Kab. Ketapang	1.680.094.446	2.168.545.571	2.375.240.076	2.259.813.904	321.153,80
7	Kab. Sintang	1.950.621.462	1.973.959.684	1.973.556.932	1.890.227.644	16.887,60
8	Kab. Kapuas Hulu	1.684.886.338	1.694.329.049	1.837.568.725	1.661.181.264	420,90
9	Kab. Sekadau	850.038.351	885.826.592	877.358.907	890.544.117	5.506,40
10	Kab. Melawi	1.180.561.043	1.060.133.712	1.162.157.713	995.804.376	2.573,60
11	Kab. Kayong Utara	787.012.793	756.973.306	777.160.159	740.100.381	2.080,50
12	Kab. Kubu Raya	1.404.722.053	15.772.570.040	1.533.365.324	1.477.080.253	10.986,60
13	Kota Pontianak	1.548.261.980	1.640.963.535	1.764.013.423	826.117.164	22.256,90
14	Kota Singkawang	845.956.951	879.090.770	920.008.487	1.547.166.420	364,40

Sumber: BPS Provinsi Kalbar 2022.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bahwa PAD di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif (naik turun). PAD tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.666.496.868. Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Kota Pontianak pada tahun 2017 mencapai Rp.

476.050.410,31 pada sektor pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan semua sektor lain dan BPHTB.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada dana transfer dari Pemerintah Pusat di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bantuan dan sumbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD (Tambunan, 2012).

Tabel 1.2
Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021
(Ribu)

No	Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Sambas	882.308.489,00	873.609.250,00	894.193.050	894.193.050,000	803.744.280,000
2.	Kabupaten Bengkayang	464.063.739,00	581.274.511,00	599.564.469	599.194.331,000	543.069.666,000
3.	Kabupaten Landak	669.285.841,00	670.222.701,00	683.669.130	684.626.255,000	-
4.	Kabupaten Pontianak	585.452.983,00	583.210.092,00	598.336.900	600.579.223,000	-
5.	Kabupaten Sanggau	831.737.641,00	824.217.941,00	843.057.919	841.905.919,000	740.408.943,000
6.	Kabupaten Ketapang	787.062.196,00	1122.269.534,00	1.148.116.453	1.149.675.156,000	1.032.254.019,000
7.	Kabupaten Sintang	266.656.066,00	909.410.866,00	933.800.038	930.728.038,000	-
8.	Kabupaten Kapuas Hulu	7.434.709,86	975.757.515,00	996.869.776	996.869.776,000	891.104.376,000
9.	Kabupaten Sekadau	2.206.389,00	504.548.895,00	514.671.472	515.570.134,000	463.850.905,000
10.	Kabupaten Melawi	615.353.661,00	603.840.939,00	616.672.615	616.672.615,000	-
11.	Kabupaten Kayong Utara	464.063.739,00	472.544.021,00	486.572.256	486.572.256,000	444.906.629,000
12.	Kabupaten Kubu Raya	779.055.508,00	782.647.725,00	806.955.704	810.858.494,000	-
13.	Kota Pontianak	699.448.985,00	699.448.985,00	726.769.846	726.769.846,000	646.760.997,000
14.	Kota Singkawang	492.487.388,00	492.487.388,00	517.069.692	179.397.160,061	-

Sumber: BPS Provinsi Kalbar 2022.

Tabel 1.2 menunjukkan DAU tertinggi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.149.675.156,000 dan terendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 2.206.389,00 di Kabupaten Sekadau. Apabila DAU yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar, maka daerah tersebut masih sangat bergantung pada transferan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya, yang berarti tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut masih rendah. DAU, DAK, dan DBH serta transfer lainnya dari

pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tabel 1.3
Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021
(Ribu)

No	Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Sambas	49.679.378,00	33.567.663,00	28.382.882	30.740.321,000	62.344.230,222
2.	Kabupaten Bengkayang	25.907.411.445,75	19.190.702,92	26.324.203	17.815.722,000	60.490.145,000
3.	Kabupaten Landak	40.223.270,70	32.199.001,43	29.605.168	22.922.823,907	886.489.445,038
4.	Kabupaten Pontianak	19.542.467,14	17.355.956,08	20.230.031	14.774.079,625	-
5.	Kabupaten Sanggau	58.098.812,31	68.558.016,00	82.409.793	65.617.897,000	118.778.666,415
6.	Kabupaten Ketapang	26.471.101,56	118.349.305,11	106.069.508	70.307.570,746	266.748.822,504
7.	Kabupaten Sintang	308.899.951,00	40.964.257,05	45.119.712	20.781.051,000	-
8.	Kabupaten Kapuas Hulu	31.477.670,97	33.661.276,00	41.809.154	24.786.153,273	68.542.197,715
9.	Kabupaten Sekadau	20.749.089,00	22.927.486,89	23.190.490	34.602.030,616	62.601.632,469
10.	Kabupaten Melawi	31.324.172,76	24.199.888,00	24.870.866	944.681,000	-
11.	Kabupaten Kayong Utara	17.282.751,33	17.636.689,83	19.992.367	13.769.864,978	71.225.105,674
12.	Kabupaten Kubu Raya	20.135.986,68	35.479.908,42	39.359.523	15.043.565,000	-
13.	Kota Pontianak	41.951.188,88	-	54.559.719	38.860.106,726	83.561.957,507
14.	Kabupaten Singkawang	15.419.151,69	17.274.801,31	18.022.758	14.234.429,877	-

Sumber: BPS Provinsi Kalbar 2018.

Tabel 1.3 menunjukkan DBH tertinggi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2017 mencapai Rp. 25.907.411.445,75 dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp. 944.681,000 di Kabupaten Melawi.

Tabel 1.4
Belanja Modal Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2017-2021
(Ribu)

No	Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Sambas	298.349.319,00	286.654.819,00	339.865.826,000	339.865.826,000	285.088.808,225
2.	Kabupaten Bengkayang	320.483.341,00	189.787.585,87	180.589.676,689	180.589.676,689	136.917.833,210
3.	Kabupaten Landak	309.338.003,54	279.422.496,82	241.790.880,253	241.790.880,253	197.232.696,870
4.	Kabupaten Pontianak	388.317.667,11	167.919.933,54	176.192.129,381	176.192.129,381	167.829.809,024
5.	Kabupaten Sanggau	334.211.848,68	265.402.788,00	312.984.598,000	312.984.598,000	158.438.058,069
6.	Kabupaten Ketapang	372.844.906,04	19.139.061,40	696.363.343,014	696.363.343,014	377.336.722,195
7.	Kabupaten Sintang	442.713.234,00	335.980.890,62	378.604.349,335	378.604.349,335	273.150.664,287
8.	Kabupaten Kapuas	363.660.077,49	363.888.159,00	412.301.577,995	412.301.577,995	382.251.203,530

	Hulu					
9.	Kabupaten Sekadau	243.368.686,00	227.418.353,62	190.993.933,000	190.993.933,000	156.373.879,095
10.	Kabupaten Melawi	332.333.575,23	174.122.061,00	281.932.299,000	281.932.299,000	135.551.374,181
11.	Kabupaten Kayong Utara	262.046.000,94	168.430.912,59	156.831.158,178	156.831.158,178	161.999.536,931
12.	Kabupaten Kubu Raya	256.173.394,54	116.084.073,00	205.629.289,000	205.629.289,000	211.966.116,342
13.	Kota Pontianak	445.386.026,22	190.796.964,14	437.337.696,211	437.337.696,211	386.624.114,390
14.	Kabupaten Singkawang	198.985.657,00	242.244.490,97	208.338.835,019	208.338.835,019	348.433.973,957

Sumber: BPS Provinsi Kalbar 2022.

Tabel 1.4 menunjukkan belanja modal tertinggi di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 mencapai Rp. 696.363.343,014 dan terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp. 135.551.374,181 di Kabupaten Melawi.

Secara umum pemerintah daerah Kalimantan Barat masih banyak mengalami masalah diantaranya ketidakcukupan sumber daya financial, minimnya jumlah pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian, prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memenuhi, rendahnya produktivitas pegawai, infrastruktur yang kurang mendukung, lemahnya penegak hukum (aparatus penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegak hukum, *political will* yang rendah, adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan lemahnya akuntabilitas sehingga hasil PAD, DAU, DBH dan belanja modal lebih rendah dibandingkan dengan Pemerintah Jawa Tengah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Tahar dan Zakhiya (2011) yang melakukan analisis tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Kedua, DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Ketiga, PAD, DAU dan kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adi (2016) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening pada

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Belanja Modal, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah namun berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAK berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Belanja Modal, pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Novianti (2016) mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan belanja modal sebagai variabel mediasi pada kabupaten/kota di Indonesia 2010-2013. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dimana pengaruh PAD terhadap Belanja Modal lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sudah berkurang.

Novalistia (2016) juga menjelaskan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan variabel pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak memiliki nilai F hitung sebesar $35,059 > F \text{ Tabel} = 2,47$ dengan signifikansi $0.000 < \alpha = 0.05$ serta bertanda positif, maka H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diterima.

Adi, (2016) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan

pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, dimana pada penelitian ini mengambil objek yang berbeda yaitu pada pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat dari periode 2017-2021. Kalimantan barat terdiri dari dua belas kabupaten dan dua kota yaitu masing-masing Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Pemerintah daerah se-Kalimantan Barat masih memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam membiayai sarana dan prasarana daerahnya. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal serta tingkat kemandirian pemerintah daerah se-Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017-2021.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

PAD di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuatif (naik turun). PAD tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.666.496.868. DAU

tertinggi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.149.675.156,000 dan terendah terjadi pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 2.206.389,00 di Kabupaten Sekadau. DBH tertinggi di Kabupaten Ketapang pada tahun 2017 mencapai Rp. 25.907.411.445,75 dan terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp. 944.681,000 di Kabupaten Melawi. belanja modal tertinggi di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 mencapai Rp. 696.363.343,014 dan terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp. 135.551.374,181 di Kabupaten Melawi

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat belanja modal?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat belanja modal?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat belanja modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat belanja modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat belanja modal.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh hasil penelitian yang memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang akuntansi keuangan daerah.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat terutama kaitannya dengan bahan masukan bagi pengambilan keputusan pembangunan kedepan.